

BIROKRASI POLITIK

DESKRIPSI MATA KULIAH

□ Mata Kuliah ini memberikan penjelasan mengenai konsep Birokrasi, Pendekatan dalam Birokrasi, Hubungan Birokrasi dengan Pelayanan Publik dan hal-hal yang berkaitan antara birokrasi dan Politik

□ Melalui Mata Kuliah Birokrasi dan Kajian Politik ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dinamika tentang konsep birokrasi serta kaitannya dengan pelayanan publik dan politik.

BAGIAN 1: Pengertian dan Konsep

Birokrasi

Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata Biro (meja) dan Kratein (pemerintahan), yang jika disintesakan berarti pemerintahan Meja.

Pendapat lain mengenai “Birokrasi” berasal dari kata “*bureau*”. Kata “*bureau*” berasal dari Perancis yang kemudian diasimilasi oleh Jerman. Artinya adalah meja atau kadang diperluas jadi kantor. Sebab itu, terminologi birokrasi adalah aturan yang dikendalikan lewat meja atau kantor

Birokrasi adalah "setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hirarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya 'mengalir' dari 'atas' ke 'bawah.' Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan Civil Service (pelayanan publik).

Di masa kontemporer, birokrasi adalah "mesin" yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di organisasi baik pemerintah maupun swasta. Pada pucuk kekuasaan organisasi terdapat sekumpulan orang yang menjalankan kekuasaan secara kurang birokratis, dan dalam konteks negara, mereka misalnya parlemen atau lembaga kepresidenan. Selain itu Konsep-konsep birokrasi secara awam lekat dengan stempel "tak efektif", "lambat", "kaku", bahkan "menyebalkan." Stempel-stempel seperti ini pada satu sisi menemui sejumlah kebenarannya pada fakta lapangan. Namun, sebagian lain merupakan stereotipe yang sesungguhnya masih dapat diperdebatkan keabsahannya.

Dengan demikian maka Istilah Birokrasi dalam masyarakat dimaknai secara diametral

Dengan demikian maka Istilah Birokrasi dalam masyarakat dimaknai secara diametral (bertentangan satu sama lain yang tidak mungkin mencapai titik temu):

1. Secara Positif: Birokrasi sebagai alat yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya alat yang efisien dan efektif ini maka tujuan suatu organisasi (privat maupun publik) lebih mudah tercapai.

2. Secara Negatif: Birokrasi sebagai alat untuk memperoleh, mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan. Birokrasi adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan (inflexibility) dan kemandegan struktural (structural static), tatacara yang berlebihan (ritualism) dan penyimpangan sasaran (pervesion goals), sifat pengabaian (alienation) serta otomatis (automatism) dan menutup diri

Definisi Birokrasi Menurut Para Pakar (1)

Farel Heady (1989):

Birokrasi adalah struktur tertentu yang memiliki karakteristik tertentu: hierarki, diferensiasi dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarkhi berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Diferensiasi yang dimaksud adalah perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan kualifikasi atau kompetensi maksudnya adalah seorang birokrat hendaknya orang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional.

Definisi Birokrasi Menurut Para Pakar (2)

Hegel :

Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memmanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan.

Definisi Birokrasi Menurut Para Pakar (3)

Blau dan Meyer :

Birokrasi adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan (inflexibility) dan kemandegan struktural (structural static), tata cara yang berlebihan (ritualism) dan penyimpangan sasaran (pervesion goals), sifat pengabaian (alienation) serta otomatis (automatism) dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat (constrain of dissent). Dengan demikian Blau dan Meyer melihat bahwa birokrasi adalah sesuatu yang negatif yang hanya akan menjadi masalah bagi masyarakat.

Definisi Birokrasi Menurut Para Pakar (4)

Almond and Powell (1966):

The Governmental Bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, linked in a complex grading subordinates to the formal role maker (Birokrasi Pemerintahan adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal)

Klasifikasi Birokrasi (1)

Birokrasi menurut Evers, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Birokrasi dipandang sebagai rasionalisme prosedur pemerintahan dan aparat administrasi publik.
2. Birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang membengkak dan jumlah pegawai yang besar.
3. Birokrasi dipandang sebagai perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat.

Klasifikasi Birokrasi (2)

Lee, mengklasifikasikan Birokrasi ke dalam birokrasi terbuka, campuran, dan tertutup.

1. **Birokrasi Terbuka** : Dicitakan dengan aksesibilitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pemberian pelayanan.
2. **Birokrasi Tertutup** : Dicitakan dengan Sistem yang ketat, yang hanya dipunyai oleh para kalangan elite, orang-orang yang dapat bergabung adalah mereka yang telah melalui seleksi yang ketat
3. **Birokrasi Campuran** : Dicitakan dengan Fleksibilitas ketika aparatur/birokrat dianggap kurang mampu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga diperlukan bantuan dari para expert untuk mengatasi masalah tersebut.

BAGIAN 2: Konsep Birokrasi *Max Webber* dan *Martin Albrow*

- **Max Weber** adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Birokrasi dianggap oleh Weber sebagai tidak rasional. Banyak pengangkatan pejabat yang mengacu pada political-will pimpinan Dinasti. Akibatnya banyak pekerjaan negara yang “salah-urus” atau tidak mencapai hasil secara maksimal. Atas dasar “ketidakrasional” itu, Weber kemudian mengembangkan apa yang seharusnya (ideal typhus) melekat di sebuah birokrasi.

Tipe Ideal Birokrasi Webber (1)

Menurut Weber (1948), organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan karakteristik struktural, yakni :

Pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi.

Tipe Ideal Birokrasi Webber (2)

- Kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan.
- Ketiga, hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.

Tipe Ideal Birokrasi Webber (3)

➤ Keempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Para manajer harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja secara logis, dan individu yang berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya demi perusahaan.

➤ Kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu yang melaksanakan tugasnya-tugasnya.

Tipe Ideal Birokrasi Webber (4)

- **Keenam, impersonality dan profesionalisme** dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri.
- **Ketujuh, uraian tugas yang terperinci** harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan.
- **Kedelapan, rasionalitas dan predictability** dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan.

Tipe Birokrasi Martin Albrow (1)

Martin Albrow adalah sosiolog dari Inggris. Ia banyak menulis seputar pandangan para ahli seputar konsep birokrasi Weber. Akhirnya, ia sendiri mengajukan beberapa konsepsinya seputar birokrasi. Albrow membagi 7 cara pandang mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini dipergunakan sebagai pisau analisa guna menganalisis fenomena birokrasi yang banyak dipraktekkan di era modern

Tipe Birokrasi Martin Albrow (2)

Ketujuh konsepsi birokrasi Albrow adalah :

1. Bureaucracy as Rational Organization

Birokrasi sebagai Organisasi Rasional. Dalam pengertian ini birokrasi dimaknai sebagai suatu organisasi yang rasional dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Setiap tindakan birokrasi hendaknya mengacu pada pertimbangan-pertimbangan rasional.

2. Bureaucracy as Rule by Official

Birokrasi sebagai Aturan yang dijalankan oleh para pejabat. Birokrasi merupakan seperangkat aturan yang dijalankan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan-aturan itu dibuat guna mempermudah proses pelayanan publik. Namun pada kenyataannya aturan tersebut sering disalahgunakan demi kepentingan pejabat yang bersangkutan. Akibatnya masyarakat menjadi antipati dengan berbagai aturan yang dibuat oleh pejabat publik dan cenderung tidak ditaati.

Tipe Birokrasi Martin Albrow (3)

3. Bureaucracy as Organizational Inefficiency

Birokrasi sebagai Pemborosan yang dilakukan oleh organisasi. Pemborosan (inefficiency) yang dimaksudkan adalah pemborosan dalam segi waktu, tenaga, finansial maupun sumber daya lainnya.

4. Bureaucracy as Public Administration

Birokrasi sebagai Administrasi Publik. Birokrasi dalam hal ini disama artikan dengan administrasi publik. Administrasi Publik adalah proses pengelolaan sumber daya publik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Birokrasi adalah unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien dan rasional.

Tipe Birokrasi Martin Albrow (4)

5. Bureaucracy as Administration by Officials

Birokrasi sebagai Administrasi yang dilaksanakan oleh para pegawai. Dalam hal ini pemahaman terhadap makna birokrasi hampir sama dengan bureaucracy as rule by official dan bureaucracy as public administration.

6. Bureaucracy as the Organization

Birokrasi sebagai Organisasi. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal. Organisasi merupakan suatu sistem kerjasama yang melibatkan banyak orang, dimana setiap orang mempunyai peran dan fungsi serta tugas yang saling mendukung demi tercapainya tujuan organisasi.

Tipe Birokrasi Martin Albrow (5)

7. Bureaucracy as Modern Society

Birokrasi merupakan ciri dari masyarakat modern. Bagi masyarakat modern keberaturan merupakan sebuah kemestian. Keberaturan itu dapat dicapai jika dilaksanakan oleh suatu institusi formal yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang masyarakat. Institusi formal itu adalah birokrasi.

BAGIAN 3: Fungsi Birokrasi Dalam Pemerintahan (1)

Michael G. Roskin, menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dealam suatu pemerintahan modern. Fungs-fungsi tersebut adalah :

1. Administrasi

Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan.

Fungsi Birokrasi Pemerintahan (2)

2. Pelayanan

Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan meteorologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam

3. Pengaturan (regulation)

Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan anantara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.

Fungsi Birokrasi Pemerintahan (3)

4. Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut.

BAGIAN 4: Patologi Birokrasi

Menurut *Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl*), Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan. Patologi Birokrasi (Bureaupathology) adalah himpunan dari perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat

Gejala Patologi Birokrasi (1)

Gejala patologi dalam birokrasi, menurut *Sondang P. Siagian*, bersumber pada lima masalah pokok. **Pertama**, persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok, dan nepotisme. **Kedua**, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan.

Gejala Patologi Birokrasi (2)

Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan "penggemukan" pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya.

Keempat, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif. ***Kelima***, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalance dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih.

Jenis-Jenis Patologi Birokrasi

Penanganan Berlarut

Penyimpangan Prosedur

Melalaikan Kewajiban

Pemalsuan

Diskriminatif/Politis

Gratifikasi

Bertindak Tidak Layak

Intervensi

Penyalahgunaan Wewenang

Praktek KKN

Inkompetensi

Kurang Disiplin

Kurang Transparan

Kurang Akuntabel

Bersikap Arogan

Faktor Penyebab Patologi Birokrasi (1)

Menurut *JW Schoorl* (1984):

1. Kekurangan Administrator yang cakap
2. Besarnya jumlah aparat birokrasi
3. Luasnya tugas pemerintahan
4. Arogansi Jabatan
5. Sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi.

Faktor Penyebab Patologi Birokrasi (2)

Menurut ***Miftah Thoha, Peter M. Blau dan Marshal W Meyer , Taliziduhu Ndraha:***

1. Lemahnya faktor moral
2. Gaji rendah
3. Sistem rekrutmen dan promosi tidak baik
4. Aturan dan mekanisme kerja belum jelas
5. Birokrasi berpotensi politis
6. Lemahnya pengawasan

Implikasi Patologi Birokrasi

- Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), masyarakat, stakeholder, bangsa dan negara.
- Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan.
- Memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi.

Cara-cara Mengatasi Patologi Birokrasi

- **Penguatan Sistem dalam proses pelayanan, dengan lebih mengutamakan kepuasan publik**
- **Pemberian insentif kepada para aparat/birokrat yang telah berkinerja baik**
- **Perekrutan para aparat dengan merit sistem**
- **Pemberian Punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran dan pemberian award bagi pegawai yang berprestasi**
- **Perlu control monitoring dan Evaluasi secara terus menerus terhadap para aparat dalam pemberian pelayanan**
- **Penguatan peraturan-peraturan terhadap pegawai yang memberikan pelayanan yang akan membawa kepada perubahan *mind set*.**

BAGIAN 5: Good Governance & Clean Government

Kata governance berasal dari kata **to govern** (yang berbeda maknanya dengan **to command** atau **to order**) yang artinya memerintah. Istilah Good Governance telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN).

• Secara konseptual pengertian good (baik) dalam istilah Good Governance (kepemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;

2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud

Good governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/pemerintah (state), sektor swasta/dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society).

PRINSIP GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT (1)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental dalam good governance yang harus diperhatikan yaitu :

1. Participation (Partisipasi)
2. Rule of Law (Penegakan Hukum)
3. Transparency (Transparan)
4. Responsive (Responsif/Tanggap)
5. Concensus (Kesepakatan)
6. Equity (Kesetaraan)
7. Effective & Efficiency (Efektif dan Efisien)
8. Accountability (Akuntabilitas)
9. Visi Strategi

BAGIAN 6: Reiventing Government (*Mewirauusahakan Birokrasi*)

Konsep Mewirauusahakan Birokrasi (Reinventing Government) pertama kali disampaikan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sektor

Menurut Osborne dan Gebler, mewirausahakan birokrasi berarti mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik. Di era otonomi daerah, dimana pemerintah di daerah dituntut untuk bisa mandiri, usaha tersebut dapat diterapkan agar produktivitas dan efisiensi kerja Pemda bisa dioptimalkan.

Permasalahan yang sering muncul dalam memahami reinventing government adalah adanya anggapan bahwa dengan adanya konsep mewirauasakan birokrasi tersebut berarti kantor dinas/ instansi di Pemerintahan dituntut untuk “berbisnis” agar dapat memberi nilai tambah untuk pendapatan. Padahal, maksud yang sebenarnya adalah memberdayakan institusional. Bukan menciptakan “pengusaha” dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

Prinsip-Prinsip Reiventing Government (1)

- 1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih menjadi pengarah daripada menjadi pelaksana.**
- 2. Pemerintah sebagai milik masyarakat harus lebih memberdayakan masyarakat ketimbang terus-menerus melayani masyarakat.**

Prinsip-Prinsip Reiventing Government (2)

3. Pemerintah sebagai institusi yang berada di alam kompetisi haruslah menyuntikkan semangat persaingan ke dalam tubuh aparat dan organisasi pelayanannya

4. Unit-unit pemerintahan sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan misi harus lebih diberi kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi.

Prinsip-Prinsip Reiventing Government (3)

5. Pemerintah harus lebih mementingkan hasil yang akan dicapai daripada terlalu memfokuskan pada faktor masukan (input).

6. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan, bukannya memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. Untuk itu, cara- cara baru dalam memikat pelanggan harus dilakukan.

Prinsip-Prinsip Reiventing Government (4)

7. Pemerintah sebagai suatu badan usaha harus pandai mencari uang dan tidak hanya bisa membelanjakannya. Oleh karena itu, cara-cara mencari sumber penghasilan yang baru dan menggalakkan investasi harus selalu menjadi pemikiran para manajer pemerintahan.

8. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki daya antisipatif harus mampu mencegah daripada hanya menanggulangi masalah.

Prinsip-Prinsip Reiventing Government (5)

9. Pemerintah harus menggeser pola kerja hierarki yang dianut ke model kerja partisipasi dan kerja sama. Misalnya, rantai organisasi yang panjang dan 'gemuk' harus dikurangi, struktur organisasi yang tebal harus ditipiskan, dan gugus kendali mutu harus dikembangkan.

10. Pemerintah sebagai pihak yang berorientasi pada pasar harus berusaha mengontrol perubahan lewat penguasaannya terhadap mekanisme pasar.

BAGIAN 7: **Konflik Birokrasi**

Di dalam tubuh organisasi maupun Birokrasi umumnya terdapat bagian-bagaian atau divisi-divisi. Tidak jarang, masing-masing dari mereka memiliki kepentingan yang berbeda

Birokrasi negara dapat saja menjadi medan tempur di mana dua atau beberapa individu memperebutkan pengaruh politik ataupun dukungan politik. Misalnya, birokrasi pemerintahan daerah Indonesia yang terkonfigurasi dari paduan dua atau lebih partai politik memiliki kepentingan berbeda-beda. Gubernur atau wakil gubernur yang kebetulan berasal dari dua partai berbeda dapat saja berkonflik satu sama lain dalam manajemen birokrasi.

Michael Klaussner and Mary Ann Groves menyatakan, konflik baik di dalam maupun antar organisasi merupakan suatu hal yang lumrah dalam perjalanan roda administrasi publik. Konflik-konflik yang mungkin muncul dapat bersifat : interpersonal (terjadi antar individu dalam organisasi), antarkelompok antardivisi (antara dua atau lebih kelompok dalam organisasi), ataupun antarorganisasi (melibatkan dua atau lebih organisasi).

BAGIAN 8: Faktor- Faktor Politik Dalam Kinerja Birokrasi

Masalah politik dalam birokrasi negara terjadi pada tugas utama birokrasi-birokrasi negara. Dalam proses menjalankan suatu kebijakan, birokrasi- birokrasi negara tidaklah steril dari lingkungan politik suatu negara. Berjalan atau stagnannya implementasi kebijakan negara oleh birokrasi- birokrasi negara sangat dipengaruhi lingkungan perpolitikan suatu negara. Pengaruh-pengaruh tersebut dalam berlangsung dari lingkup internal, eksternal, resmi, ataupun non resmi.

B. Guy Peters, dimensi pengaruh politik suatu negara terhadap jalannya administrasi publik yang dijalankan birokrasi-birokrasi negara, dibagi ke dalam dua dimensi, yakni :

- 1. Dimensi Internal-Eksternal**
- 2. Dimensi Formal-Informal**

Dimensi Internal

Dimensi pertama : internal, menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan politik di dalam suatu birokrasi yang berupaya mencari sejumlah masukan dari kelompok kepentingan, partisan, eksekutif politik, dan sejumlah besar sumber-sumber lain guna membuat suatu kebijakan

Dimensi Eksternal

Dimensi Eksternal : Adalah kegiatan-kegiatan politik birokrasi yang berupaya mencapai pemeliharaan dan perkembangan organisasi.

Dimensi Formal

Dimensi Formal : Adalah kegiatan-kegiatan birokrasi yang sifatnya resmi yang biasanya menghasilkan keputusan-keputusan penting terkait akan dikeluarkan kebijakan oleh para pemimpin.

Dimensi Informal

Dimensi Informal : Adalah Lobi-lobi para birokrat yang bisa dilakukan dari person to person dalam rangka upaya perubahan atau penambahan suatu keputusan Pemerintah.

BAGIAN 9: Posisi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Birokrasi pada intinya merupakan bagian dari kerja eksekutif. Selaku implementasi undang-undang, eksekutif memiliki “tangan” yaitu birokrasi. Birokrasi ini tersebar menurut departemen-departemen ataupun kementerian-kementerian yang ada di suatu Negara.

Dalam sistem presidensial, menteri diangkat secara prerogative oleh presiden, dan dengan demikian presiden memiliki kendali atas staf dan kebijakan yang ada di suatu birokrasi. Dengan lain perkataan, terdapat suatu “hirarki” antara presiden dengan birokrasi Negara.

Dalam sistem parlementer menghendaki pembagian kursi kementerian didasarkan pada komposisi suara parlemen. Menteri, adalah anggota parlemen yang tidak bertanggung jawab kepada presiden tetapi kepada parlemen

BAGIAN 10 : Budaya Politik Dalam Birokrasi

Perbedaan antar birokrasi setiap Negara, bahkan antar wilayah di satu Negara, paling mungkin ditelusuri melalui penyelidikan atas budaya politik yang berkembang. Budaya ini mempengaruhi 'gaya' dari para birokrat publik dalam menjalankan fungsinya.

Budaya politik adalah cara lain dalam melakukan komparasi/perbedaan efektivitas dan efisiensi kerja antar Negara. Budaya politik ini mempengaruhi para pejabat publik dalam melakukan kegiatan birokrasi mereka.

Almond dan Verba telah membagi jenis budaya politik ke dalam 3 tipe, yaitu : Parokial, Subyek, dan Partisipan. Pada budaya politik parochial, warganegara relative jauh dari pemerintah pusat dan hanya mengakui pemerintah yang dekat dengan mereka. Pada budaya politik subyek, warganegara becorak pasif dan memandang pemerintah mereka dengan curiga. Pada budaya politik partisipan, warganegara merasa punya peran besar dan berhak menentukan jalannya pemerintahan.

BAGIAN 10 : Birokrasi Dan Otonomi Daerah

Guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, tentunya tidak dapat dilepaskan peranan aktif dari organisasi birokrasi pelaksana otonomi daerah

Kinerja Birokrasi di Era Otda tidak lepas dari keseriusan para pemimpin dan para elite untuk menciptakan suasana yang baik dalam sistem kerja para birokrat, tentunya dengan mengedepankan asas proporsional dan profesionalitas.

Tujuan Otonomi Daerah akan mudah dicapai jika birokrat daerah tidak berafiliasi dengan para elite dan tidak menjadikan daerah sebagai “kerajaan- kerajaan” yang hanya menguntungkan mereka.

Mind set “membangun” dalam melaksanakan otonomi daerah dengan baik harus dimiliki oleh para birokrat, dan definisi otonomi harus diterapkan secara sungguh-sungguh.

BAGIAN 12 : Birokrasi Dan Demokrasi Lokal

Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain.

Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hirarkis bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, dan seringkali secara demokratis.

Di sisi lain, lembaga pemerintahan yang demokratis diasumsikan amat responsif pada keinginan publik. Pemerintahan demokratis berupaya memetakan pilihan publik ke dalam kebijakan positif bagi warga negaranya.

Idealnya Birokrasi yang dijalankan adalah pencerminan dari keinginan rakyat secara luas yang mencerminkan sikap demokratis itu sendiri

Salah satu upaya ke arah pemberdayaan masyarakat /public adalah dengan demokrasi tingkat local. Jarak antara konstituen dengan pejabat public terpilih relative lebih dekat dengan “daerah” ketimbang “pusat.” Terlebih kini daerah telah punya kewenangan yang semakin besar dalam memproduksi dan mengimplementasikan kebijakan yang punya efek atas masyarakat.

Beberapa prinsip dalam mewujudkan demokrasi lokal yang baik :

- 1. Musyawarah untuk Mufakat**
- 2. Pendidikan Politik yang baik dan benar**
- 3. Mind set dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan berkejahteraan sosial**

BAGIAN 13: Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia

Beberapa poin langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menuju reformasi birokrasi.

Langkah internal :

1. Meluruskan orientasi, Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat.

2. Memperkuat komitmen, Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Untuk memperkuat tekad perubahan di kalangan birokrat perlu ada stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau bekerja tidak benar.

3. Membangun kultur baru, perlu dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya.

4. Rasionalisasi, Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan serta dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan teknologi informasi.

5. Memperkuat payung hukum, Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan- perubahan

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan

Langkah Eksternal :

- 1. Komitmen dan Keteladanan Para elite Politik**
- 2. Pengawasan Masyarakat**

5. Memperkuat payung hukum, Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan- perubahan

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan



WASSALAM

Vini, Vidi, Vici